

DESKRIPSI HKI

Karya ilmiah ini membahas peran paralegal dalam pendampingan pengurusan izin usaha sebagai bagian dari upaya percepatan investasi daerah. Pembahasan dilatarbelakangi oleh kebutuhan pelaku usaha atau investor terhadap pendampingan dalam memenuhi berbagai persyaratan perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). Penelitian ini menguraikan kedudukan dan fungsi paralegal dalam membantu proses perizinan, mulai dari pengumpulan data dan pemberkasan, penentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), pemeriksaan kesesuaian lokasi melalui RDTR dan PKKPR, hingga pemenuhan persyaratan terkait ANDALALIN dan AMDAL. Paralegal juga berperan sebagai penghubung antara pemohon izin dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait, dengan tetap berada di bawah naungan kantor advokat. Kajian ini menggunakan pendekatan yang menggabungkan pembahasan normatif dengan hasil wawancara mengenai praktik pendampingan perizinan. Wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan dan Koperasi serta UMKM Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa paralegal dipandang sebagai pendukung dalam menyiapkan kegiatan investasi agar lebih aman, patuh terhadap regulasi, dan meminimalkan risiko hukum. Karya ilmiah ini menunjukkan bahwa keberadaan paralegal memiliki peran dalam membantu pemenuhan persyaratan perizinan sekaligus meningkatkan pemahaman hukum bagi pelaku usaha dalam mendukung perkembangan investasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Carunia Mulya Firdausy., MADE, Ph.D., APU. (2016). *Membangun investasi daerah*. Puslit BK DPR RI. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_tim/buku-tim-public-51.pdf
- Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573. Jakarta.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724. Jakarta.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Jakarta.
- NTB. (2025). *Paralegal, Garda Terdepan Akses Hukum di Masyarakat*. KANWIL Kementerian Hukum Republik Indonesia Nusa Tenggara Bara. Diakses dari <https://ntb.kemenkum.go.id/artikel-layanan/paralegal-garda-terdepan-akses-hukum-di-masyarakat>
- Ferindha K Fachri. (2022). *Mengenal Posisi Paralegal Di Kantor Hukum*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-posisi-paralegal-di-kantor-hukum-lt63107a5fd14ed/>
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248. Jakarta.
- Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Indonesia. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Jakarta.
- Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*. Jakarta.

- Ferry Tas, S.H., M.Hum., M.SI. (2024). *One Stop Solution Percepatan Investasi Daerah Dalam Perspektif Pendampingan Hukum*. Faktual.Net. Diakses dari <https://faktual.net/one-stop-solution-percepatan-investasi-daerah-dalam-perspektif-pendampingan-hukum/>
- Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta.
- Dita Nur Mayasari. (2025). *Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)*. Surabaya. Media Hukum Indonesia. Diakses dari <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Leny Suviya Tantri. (2025). *Manfaat Ganda Penyederhanaan Perizinan Berusaha*. Ombudsman Republik Indonesia. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--manfaat-ganda-penyederhanaan-perizinan-berusaha--->
- Muhammad Luthfi, Kuku Dwi Kurniawan. (2023). *Pendampingan Pemenuhan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Bagi Pelaku Usaha*. Jurnal Dedikasi Hukum. Diakses dari <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/>
- Tim Founders. (2024). *Pentingnya Legalitas Usaha Dalam Menunjang Keberhasilan Bisnis*. Founders. Diakses dari <https://founders.co.id/pentingnya-legalitas-usaha-dalam-menunjang-keberhasilan-bisnis/>